Dukung Kinerja Penegak Hukum

Ajak Masyarakat Pantau Peradilan Tipikor di Sanggau

Fikri Akbar BorneoTribune, Sanggau

Menanggapi adanya laporan beberapa komponen masyarakat baik secara priba-

di atau organisasi kepada pihak Polres Sanggau dan Kejari Sanggau terkait adanya temuan dugaan penyalahgunaan wewenang atau pelaksanaan kegiatan proyek-proyek APBD 2010 yang dapat menimbulkan kerugian pada keuangan negara/daerah, hendaknya dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yohanes Andriyus Wijaya, SE mengatakan, partisipasi dari komponen masyarakat itu sudah barang tentu sangat menunjang kinerja aparat penegak hukum di Kabupaten Sanggau. "Adanya beberapa kasus korupsi yang sudah ke meja hijau merupakan langkah maju aparat

penegak hukum baik itu polisi, jaksa, dan hakim dalam upaya pemberantasan korupsi di daerah ini," kata pria yang mengaku sebagai Pemerhati Kebijakan Publik dan Keuangan Daerah, Sabtu, (12/2).

Partisipasi masyarakat itu juga, menurutnya, dapat diartikan sebagai bentuk dukungan masyarakat kepada aparat penegak hukum. Yakni, selama penegakan hukum tersebut tidak tebang pilih, sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat, aparat penegak hukum tidak perlu merasa ragu untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Saya yakin tidak ada satupun masyarakat di bumi Daranante ini yang mendukung pejabat atau aparatur pemerintahan yang melakukan perbuatan KKN," ujarnya. Saat ini menurut Andriyus, adanya laporan tentang indikasi atau dugaan penyimpangan terhadap pelaksanaan kegiatan proyek pada APBD tahun 2010 di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, RSUD, Bapeda, Dinas PU, Dinas Perhubungan dan Dinas ESDM hendaknya perlu ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum sesuai dengan aturan yang berlaku.

Terlepas nanti benar atau tidaknya indikasi atau dugaan tersebut, pikirnya,

perlu dibuktikan dengan melakukan penyelidikan terlebih dahulu. Jika diperlukan, katanya, baik pihak kepolisian ataupun kejaksaan bisa meminta bantuan kepada BPK atau BPKP untuk melakukan pemeriksaan investigatif guna mengetahui apakah ada perbuatan atau penyalaksan penyalaksan kayanagan kayan k

kah ada perbuatan atau penyalahgunaan kewenangan yang dapat berdampak pada kerugian keuangan negara/ daerah.

"Dengan melibatkan BPK atau BPKP maka permasalahan yang ada menjadi semakin jelas karena kedua lembaga itu memang mempunyai kompetensi untuk itu, apakah ada kerugian negara atau tidak," jelasnya.

Andriyus mengingatkan, dengan jelasnya permasalahan tersebut maka masyarakat juga tidak akan bertanya-tanya lagi tentang isuisu yang berkembang tersebut dan para aparatur Pemda juga menjadi lebih tenang dalam bekerja karena tidak ada lagi perasaan was-was karena adanya ke-

pastian akan kebenaran atau tidaknya isuisu yang ada. Dirinya menilai, kinerja aparat penegak hukum di Sanggau saat ini sudah cukup baik dalam upaya pemberantasan korupsi. Terdapat beberapa kasus yang kini telah diputusankan oleh hakim, ada yang sedang dalam proses persidangan, ada yang akan segera dilimpahkan ke pengadilan termasuk kasus TPA Meliau yang diduga melibatkan mantan Bupati Sanggau dengan inisial YA.

"Jadi harapan saya dan mungkin juga harapan masyarakat, terhadap informasi adanya dugaan perbuatan yang mengarah pada tindakan KKN, hendaknya dapat ditindaklanjuti baik oleh pihak kepolisian dan kejaksaan sesuai dengan hukum yang berlaku," katanya.

"Apalagi dengan adanya Peraturan Pemerintah No.68 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara, dan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka masyarakat dapat memantau sejauh mana tindakan dan proses yang telah dilakukan oleh penegak hukum terhadap penanganan suatu kasus korupsi," jelasnya. □



Yohanes Andriyus Wijaya